

MANFAAT BADAN USAHA MILIK DESA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LAPISAN BAWAH (Studi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

Village-owned Enterprise (BUMDes) and Bottom-layer Community Welfare

Kholilah Dzati Izzah¹⁾, Lala M Kolopaking¹⁾

¹⁾ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
E-mail: Kholilah.izzah6@gmail.com; lalako@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

The shifting of paradigm village development pushed government to establish the village economy through the Village-owned Enterprise (BUMDes). BUMDes has two main functions, namely as economic institution and social institution. The existence of BUMDes in Ponggok Village is expected to increase community's welfare and to reduce poverty through utilizing local resources in the village. Objectives of this research are 1) to identify household's welfare level of Ponggok Village; 2) to identify benefits of BUMDes Tirta Mandiri; and 3) to analyze the correlation between benefits of BUMDes to household's welfare level. This research used quantitative approach supported with qualitative data. The result indicated a significant correlation between benefits of BUMDes Tirta Mandiri to household's welfare level.

Keywords : BUMDes, economy, social, welfare, household

ABSTRAK

Pergeseran paradigma mengenai desa menjadi semangat pemerintah dalam menumbuhkan kembali perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha milik desa memiliki dua peran utama, yaitu sebagai institusi ekonomi sekaligus institusi sosial. Kehadiran BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat Desa Ponggok berdasarkan mata pencaharian utama kepala keluarga; 2) mengidentifikasi bentuk-bentuk manfaat ekonomi dan sosial dari BUMDes Tirta Mandiri; dan 3) menganalisis hubungan tingkat manfaat ekonomi dan sosial BUMDes Tirta Mandiri dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat BUMDes Tirta Mandiri dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat Desa Ponggok.

Kata Kunci : BUMDes, ekonomi, sosial, kesejahteraan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Upaya menggerakkan ekonomi desa telah dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa. Hal ini wajar mengingat jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding masyarakat miskin yang hidup di perkotaan. Badan Pusat Statistik mencatat, pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,14 juta jiwa dan 60 persennya merupakan masyarakat pedesaan. Kondisi ini menggambarkan bahwa sumber-sumber daya yang ada di desa belum terkelola dengan baik, sehingga urbanisasi masih menjadi daya tarik bagi penduduk desa (Pattiro

2016). Kota-kota besar hampir selalu 'menampung' pendatang baru pada momen-momen tertentu, misalnya setelah lebaran dan tahun baru. Citra kota sebagai sentra penyedia lapangan kerja masih melekat pada sebagian besar masyarakat pedesaan. Meski tidak sepenuhnya salah, arus urbanisasi tetap mendorong terciptanya masyarakat miskin baru di perkotaan yang hidup di pinggiran-pinggiran kota. Tanpa bekal keterampilan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, membuat para pendatang baru tersebut tidak dapat bersaing dan berakhir menjadi masalah baru bagi perkotaan. Padahal, dengan potensi dan sumber daya yang ada, desa menjadi pondasi dari pembangunan nasional.

Sidik (2015) menilai posisi desa strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Salah satu faktor yang disinyalir merupakan penghambat dari bergeraknya perekonomian desa adalah keterlibatan pemerintah yang berlebihan dalam pengelolaannya. Pembangunan yang bias kota dan bias institusi lokal menyebabkan kreativitas dan inovasi desa tidak berkembang. Pada masa orde baru, “pembangunan desa” sebagai ikon penting pemerintah telah mengubah wajah desa semakin baik, status dan kemakmuran orang desa juga semakin meningkat, tetapi struktur dan institusi negara, daerah, birokrasi maupun desa tidak mengalami perubahan besar (Eko 2014). Pada masa itu, desa diobyektivikasi sebagai sebuah entitas yang seakan tidak berdaya membangun dirinya sendiri sehingga segala upaya pembangunan digerakkan dari atas desa. Berbagai desa di Indonesia dengan karakteristik dan budaya yang berbeda satu dengan lainnya diberi program pembangunan yang sama, bahkan penyebutan ‘desa’ bagi setiap daerah dengan pemerintahan terkecil di semua daerah itu sendiri merupakan salah satunya. Hal ini kemudian menciptakan gap antara program-program yang dicanangkan pemerintah pusat – dengan tujuan memakmurkan desa– dengan kebutuhan desa itu sendiri sehingga tidak berkelanjutan karena gagal menyentuh akar permasalahannya.

Kesadaran pemerintah memberi ruang yang lebih besar bagi desa dalam proses pembangunan mulai tampak saat diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hak asal-usul, keragaman, otonomi, dan demokrasi desa disinggung dalam perundangan tersebut. Dinamika pasang surut pelibatan desa dalam proses pembangunan juga terjadi, terutama ketika pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 yang menurut kalangan yang pro terhadap isu-isu desa, telah ‘menyajikan’ kemunduran dibanding undang-undang sebelumnya. Salah satu yang dirasa menjadi masalah pada perundangan yang baru itu adalah pengisian sekretaris desa (sekdes) dengan PNS dan/atau pengangkatan sekdes menjadi PNS, karena merupakan birokratisasi desa yang melemahkan otonomi desa dan berpotensi menciptakan ketegangan sosial di level desa (Eko 2014).

Paradigma yang menempatkan desa sebagai obyek pembangunan berangsur-angsur bergeser semenjak

diterbitkannya PP Nomor 72 Tahun 2005, yang didalamnya mengatur tentang perencanaan desa (RPJM Desa) dan adanya Anggaran Dana Desa (ADD). Dua hal ini menjadi pemantik bagi desa untuk menyelenggarakan otonomi dan berpartisipasi aktif membangun masyarakatnya sendiri. Paradigma desa yang kini sebagai subyek pembangunan juga semakin dimantapkan setelah lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pergeseran paradigma inilah yang kemudian melahirkan perspektif mengenai desa lama versus desa baru. Salah satu aspek yang paling mendasar dari perbedaan perspektif desa lama dibanding desa baru adalah kedudukan desa. Pada perspektif desa baru, desa bukan lagi hanya sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Lebih dari itu, kedudukan desa kini sebagai pemerintahan masyarakat, yaitu *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*. Dampak lain dari adanya pergeseran paradigma mengenai desa adalah munculnya semangat dalam menumbuhkan kembali perekonomian desa dengan tujuan memandirikan desa, yaitu melalui suatu lembaga ekonomi bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Cikal bakal BUMDes telah tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih spesifik, BUMDes kemudian diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan kembali dirinci dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan, pada UU Nomor 6 Tahun 2014, peraturan mengenai BUMDes dibuat lebih *elaboratif* dengan dirincinya BUMDes ke dalam tiga pasal pada bab X (Ridlwan 2014). BUMDes setelah diberlakukan UU Desa memberikan penekanan yang lebih pada aspek kemandirian, yaitu desa didorong untuk melakukan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri. Jika sebelum UU Desa BUMDes masih menjadi lembaga ekonomi yang pembentukannya atas dasar instruksi pemerintah di atasnya, maka setelah adanya UU Desa BUMDes dibentuk atas keinginan masyarakat itu sendiri berdasarkan potensi yang ada yang jika dikelola dengan cepat akan menimbulkan permintaan di pasar (Ridlwan 2014). Pengorganisasian BUMDes saat ini diatur melalui Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Keberadaan BUMDes menurut Sayutri (2011) diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta

dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, pendirian dan pelembagaan BUMDes juga sejalan dengan semangat 'desa membangun' yang ramai dijadikan solusi atas permasalahan ketimpangan desa-kota sebagai dampak dari pembangunan perdesaan yang lebih mementingkan fisik dan sarat akan kapitalisme. Sampai Desember 2018, Kemendes PDTT mencatat telah terbentuk 45.549 unit BUMDes, atau sebanyak 61% dari total desa di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu telah menyebutkan keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat, seperti penelitian Syukran (2016) mengenai BUMDes di Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro. BUMDes yang memiliki aktivitas bisnis di bidang usaha simpan pinjam permodalan, kredit barang elektronik, dan bank sampah tersebut dinilai oleh masyarakatnya berdampak pada peningkatan penghasilan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Masih di Kabupaten Bojonegoro, penelitian Budiono (2015) di Desa Kedungprimen, Kecamatan Kanor, juga menunjukkan kebermanfaatannya BUMDes dalam meningkatkan hasil panen masyarakat dan memberi tambahan kepada PADes melalui bisnis sosial yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yaitu usaha pengairan lahan pertanian warga. Meski begitu, tidak selamanya kesuksesan BUMDes secara materi sejalan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakatnya. Penelitian Kusuma et al (2016) di tiga BUMDes yang terdapat di Desa Pojong, Bleberan, dan Sumbermulyo menunjukkan, keberadaan BUMDes di ketiga desa tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun pengurus BUMDes dan pemerintah desa mengklaim pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik.

BUMDes Tirta Mandiri juga merupakan salah satu BUMDes yang berhasil. Bahkan BUMDes ini berhasil mendapat predikat sebagai BUMDes terbaik Nasional pada tahun 2016 yang diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. BUMDes Tirta Mandiri merupakan BUMDes yang dimiliki oleh Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUMDes ini didirikan pada tahun 2009 dan berjalan aktif sampai saat ini. Salah satu unit usaha unggulan yang menyokong keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri adalah usaha pariwisata air yang dinamakan Umbul Ponggok. Hal ini dikarenakan karena potensi yang dimiliki Desa Ponggok berupa melimpahnya mata air yang pada awalnya belum dimanfaatkan secara

optimal. Pada tahun 2015, objek wisata ini menyumbang 90% pendapatan BUMDes yang kemudian digunakan dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Pemasukan BUMDes Tirta Mandiri sendiri sudah mencapai Rp9,4 miliar pada tahun 2016. Kontribusi nyata BUMDes telah membawa desa Ponggok dari status desa tertinggal dengan pendapatan Rp14 juta per tahun menjadi desa mandiri dengan pendapatan Rp4 miliar per tahun.

Desa saat ini masih menjadi basis masyarakat miskin dibanding wilayah perkotaan, maka keberadaan BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok seyogyanya menjadikan Desa Ponggok mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara sosial maupun ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk meneliti manfaat BUMDes Tirta Mandiri untuk kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat Desa Ponggok?; 2) bagaimana manfaat BUMDes bagi kesejahteraan rumah tangga?; 3) manfaat secara ekonomi atau sosialkah dari BUMDes Tirta Mandiri yang paling dirasakan oleh rumah tangga lapisan bawah?; dan 4) bagaimana hubungan manfaat BUMDes Tirta Mandiri dengan kesejahteraan rumah tangga di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah?

PENDEKATAN TEORITIS

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 1 angka (6) UU No.6 Tahun 2014 mendefinisikan BUMDes sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk usaha yang dilakukan oleh BUMDes juga tidak harus berbadan hukum, dan pengelolaannya diharuskan terpisah dari pemerintah desa. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar-desa. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 89 UU Desa, bahwa hasil usaha

BUMDes digunakan untuk, pertama, pengembangan usaha; dan kedua, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUMDes memiliki dua fungsi utama (Alkadafi 2014), yaitu sebagai institusi komersil dan institusi sosial. Sebagai institusi komersil, BUMDes bertujuan menghasilkan keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, fungsi BUMDes sebagai institusi sosial adalah berkontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Kontribusi BUMDes dalam ekonomi dan sosial bagi masyarakat ini merupakan salah satu yang membedakannya dengan lembaga perekonomian di tingkat desa lainnya, seperti koperasi.

Peran dan Manfaat BUMDes

Kehadiran UU desa telah mendorong terciptanya konsep mengenai 'tradisi berdesa'. Eko (2014) mendefinisikan tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah desa, dengan inti gagasan:

1. desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
3. desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Jika dihubungkan dengan BUMDes, maka BUMDes merupakan pengejawantahan dari konsep tradisi berdesa (Putra 2015), khususnya dalam perannya, pertama, sebagai bentuk usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif, antara masyarakat bersama pemerintah desa. Usaha ekonomi ini haruslah mengandung unsur bisnis ekonomi sekaligus sosial. Kedua, BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.

BUMDes memungkinkan desa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga meningkatkan pendapatan asli desa (Pades) dan kesejahteraan masyarakatnya (Chikamawati 2015). Ramadana *et. al* (2014) menempatkan badan usaha milik desa sebagai unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Jika dirinci lagi, kontribusi BUMDes untuk penguatan ekonomi desa adalah sebagai berikut (Ramadana 2014):

1. Sebagai sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa
2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat
3. Pembangunan desa secara mandiri

Keberadaan BUMDes di suatu desa dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial, sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes yang tercantum dalam Pasal 3 Permendesa PDPTT No. 4 Tahun 2015, yaitu:

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Penelitian Alkadafi (2014) di Desa Selensen, Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan keberadaan BUMDes yang bergerak dalam bisnis usaha simpan pinjam berhasil memberikan akses modal kepada masyarakat, menciptakan pengaturan pengelolaan pasar desa sekaligus pembangunan infrastukturnya, memberikan pelayanan kepada warga di bidang penerangan, dan meningkatkan PADes. Hal sejalan juga diindikasikan pada penelitian Syukran (2016) di Desa Bareng. Hekmatyar *et. al* (2018) dalam penelitiannya di Desa Kedungprimen, Bojonegoro, menemukan keberadaan BUMDes telah memberikan kontribusi melalui alokasi hasil usaha untuk berbagai kebutuhan, seperti perbaikan pelayanan umum, pendidikan, dana sosial yang menysasar fakir miskin dan anak yatim, dan alokasi kesejahteraan desa yang

meskipun belum menyentuh semua lapisan masyarakat (hanya dirasakan aparat desa). Selama ini, pelayanan desa cenderung rendah karena terhambat pemasukan dana. Dengan adanya BUMDes, diharapkan akan terjadi aliran dana yang berguna bagi peningkatan layanan di tingkat desa. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan keberadaan unit-unit usaha yang terjangkau, baik dari segi harga maupun jarak akses. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa sehingga memunculkan dampak sosial yang lebih luas (Widodo 2016). Salah satu dampak sosial tersebut adalah menekan laju urbanisasi karena BUMDes berpeluang menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Penelitian (Kasila 2018) di Desa Ponggok menunjukkan keberhasilan BUMDes dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda melalui pengelolaan pariwisata khususnya Umbul Ponggok. Lebih jauh, keberadaan BUMDes juga berperan dalam menciptakan iklim optimisme terhadap kemampuan desa sendiri sehingga masyarakat menjadi bangga terhadap desanya.

Konsep Kesejahteraan

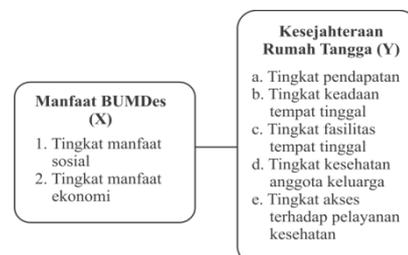
Pengertian kesejahteraan (*welfare*) menurut Suharto (2006), setidaknya mengandung 4 makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), sebagai pelayanan sosial, sebagai tunjangan sosial, dan sebagai proses atau usaha terencana. Namun dalam penelitian ini, konsep kesejahteraan yang akan digunakan menunjuk pada makna kondisi sejahtera (*well-being*). Menurut Fahrudin (2012) dalam Rosni (2017), Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Menurut Badan Pusat Statistik (2005) dalam Sugiharto (2007), indikator yang digunakan BPS untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Hasil pengukuran taraf hidup dapat menunjukkan posisi

kesejahteraan rumah tangga, yaitu di tingkat kesejahteraan rendah, sedang atau tinggi.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini (Gambar 1) megacu pada manfaat BUMDes dan kesejahteraan rumah tangga. BUMDes sebagai institusi sosial sekaligus komersil dibentuk dengan tujuan meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa melalui penawaran sumber daya lokal. Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, maka manfaat ekonomi dari BUMDes Tirta Mandiri pada penelitian ini diukur melalui keikutsertaan dalam investasi, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan tambahan penghasilan. Sementara itu, manfaat sosial dari BUMDes Tirta Mandiri diukur melalui pemberdayaan UKM, menghambat urbanisasi, pemberian jaminan kesehatan dan dana sosial, serta penyediaan air bersih, pengangkutan sampah, dan pemerataan listrik.

Kesejahteraan rumah tangga merupakan ukuran dalam menilai kemampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan rumah tangga yang diukur melalui taraf hidup, menggunakan variabel yang ditetapkan oleh BPS (2005) dalam Sugiharto (2007) seperti yang tercantum pada Gambar 1. Hasil pengukuran tingkat kesejahteraan pada penelitian ini akan menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan rumah tangga berbagai lapisan di desa Ponggok, sehingga dapat dilihat sejauh mana keberadaan BUMDes Tirta Mandiri memiliki kaitan dengan kesejahteraan rumah tangga.



Gambar 1 Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan: 1) Tahun 2004 Desa Ponggok termasuk desa tertinggal yang kemudian menjadi desa mandiri sejak berdirinya BUMDes Tirta Mandiri; 2) BUMDes Tirta Mandiri mendapat

penghargaan dari Kementrian desa PDPTT sebagai BUMDes Terbaik Nasional pada 2016; dan 3) BUMDes Tirta Mandiri telah mampu menyumbang pemasukan ke PADes sebesar Rp350 juta pada tahun 2014 dan terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini efektif dilakukan selama delapan bulan, dan pengambilan data lapang dilakukan pada Maret 2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung data kualitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah penelitian survei dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dan observasi dengan panduan pertanyaan sebagai instrumen. Data kualitatif yang disajikan deskriptif digunakan untuk mendukung atau menguatkan data kuantitatif yang terbatas hanya pada kuesioner. Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang, dan populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga yang terletak di RW 1, 2, dan 3. Ketiga RW ini merupakan wilayah desa Ponggok yang paling dekat dengan unit-unit usaha BUMDes sehingga diasumsikan merupakan wilayah penduduk yang paling terkena dampak dari keberadaan BUMDes. Kerangka sampling disusun berdasarkan daftar rumah tangga yang ada di ketiga RW, kemudian dikategorikan berdasarkan mata pencaharian untuk memilih sampel secara acak dengan teknik sampel acak berstrata. Daftar kepala rumah tangga dari setiap kategori mata pencaharian lalu dipilih dengan jumlah sesuai proporsinya sehingga total responden 30 orang (Tabel 1).

Tabel 1 Jumlah sampel berdasarkan mata pencaharian

Pekerjaan	Kode	Jumlah populasi		Sampel
		n	%	
Buruh tani/ buruh harian lepas	1	96	31%	9
Petani	2	10	3%	1
Pedagang/ wiraswasta	3	73	23%	7
Pegawai swasta	4	117	38%	11
PNS	5	16	5%	2
Total		312	100%	30

Pemilihan terhadap informan dilakukan secara sengaja (*purposive*). Informan dalam penelitian adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sejarah dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistic 23 for Windows*. Pengujian data menggunakan uji korelasi *rank spearman* dengan nilai signifikansi $\alpha < 0,05$. Uji

korelasi *rank spearman* pada penelitian ini digunakan untuk menguji hubungan antara manfaat BUMDes dan kesejahteraan rumah tangga. Sementara itu, data kualitatif akan diolah melalui tiga langkah yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ponggok

Desa Ponggok merupakan desa yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 77,3 Ha. Secara administrasi, desa Ponggok terdiri atas 6 RW dan 12 RT. RW 2, 3, dan sebagian RW 1 merupakan wilayah yang memiliki penduduk terpadat. Di wilayah itu pula pusat unit-unit usaha BUMDes berada, seperti unit usaha pariwisata Umbul Ponggok dan Ponggok Ciblon, serta unit usaha toko desa. Hal inilah yang menyebabkan wilayah ini memiliki jumlah penduduk terpadat karena di ketiga RW lainnya, penggunaan lahan didominasi untuk sektor pertanian dan kawasan lindung (sumber mata air). Selain umbul Ponggok, desa ini juga memiliki sumber mata air lain, yaitu umbul Sigedang, umbul Kajen, dan umbul Besuki. Jumlah penduduk desa Ponggok sampai tahun 2017 berdasarkan data monografi desa tercatat sebanyak 2.124 jiwa, dengan 663 kepala keluarga. Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dengan jumlah penduduk perempuan 1065 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 1059 jiwa. Berdasarkan usia, penduduk desa Ponggok berada pada rentang usia 0 hingga 57 tahun ke atas. Pemerintah desa Ponggok mengelompokkan warganya ke dalam dua kelompok usia, yaitu usia sekolah dan usia tenaga kerja. Jumlah penduduk desa Ponggok yang berada dalam kelompok usia tenaga kerja lebih banyak dibanding kelompok usia kelompok pendidikan. Hal ini menunjukkan di desa Ponggok sebagian besar penduduknya berada dalam usia produktif, dengan mayoritas berusia 27 sampai 40 tahun.

Kategori pekerjaan yang dilakukan penduduk desa Ponggok sebagian besar adalah karyawan. Data monografi desa Ponggok tahun 2017 merinci jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori karyawan, yaitu a) Pegawai Negeri Sipil; b) ABRI/ Kepolisian RI; c) Swasta/ Karya Swasta; d) Buruh Harian Lepas, dan e) Honorer/ Guru. Selain karyawan, terdapat 7 kategori pekerjaan lain yang terdapat di desa Ponggok. jenis pekerjaan dalam kategori karyawan yang paling besar persentasenya adalah sebagai swasta/ karya swasta. Hal ini tidak terlepas dari

keberadaan PT. TIV Aqua Klaten yang terletak di Dukuh Umbulsari, RW 6, desa Ponggok. Perusahaan air minum ini efektif beroperasi di desa Ponggok pada tahun 2000 dengan memanfaatkan sumber mata air Umbul Sigedang atau disebut juga Umbul Kapilarer. Dengan melepas tanah kas sumber mata air seluas 1,15 Ha kepada PT. TIV Aqua Klaten, desa Ponggok kemudian memperoleh pergantian lahan seluas 7,82 Ha. Pemerintah desa Ponggok kemudian membuat nilai tawar dengan mengajukan beberapa persyaratan kepada PT. TIV Aqua Klaten, salah satunya adalah keharusan perusahaan untuk merekrut 40% dari keseluruhan karyawannya dari warga desa Ponggok. Tidak mengherankan jika data tahun 2017 mencatat 42,2% penduduk produktif desa Ponggok bermatapencaharian sebagai karyawan swasta. Keuangan desa Ponggok selain disokong oleh pemasukan dari perusahaan tersebut juga disokong oleh sumber-sumber lain, namun yang khas bagi desa Ponggok adalah adanya PAD yang berasal dari hasil usaha desa, dalam hal ini BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, dalam detail sumber dan jumlah PAD yang tercantum dalam APBDes tahun 2017 terdapat pula hasil aset desa. Aset desa ini antara lain kios kuliner di seberang obyek wisata Ponggok Ciblon. Bervariasinya sumber-sumber keuangan desa Ponggok menjadikan desa ini memiliki pemasukan yang besar, mencapai Rp3,5 Miliar pada tahun 2017.

Perkembangan BUMDes Tirta Mandiri

Pembicaraan mengenai BUMDes Tirta Mandiri tidak terlepas dari sejarah Umbul Ponggok, karena salah satu penyokong keberhasilan yang utama dari BUMDes di desa ini berasal dari pengelolaan pariwisata Umbul Ponggok. Umbul Ponggok pada tahun 1920-an merupakan sumber mata air yang dikuasai salah satu pabrik gula yang letaknya di sebelah timur Umbul Ponggok. Air dari mata air ini digunakan dalam proses penggilingan tebu menjadi gula. Setelah gejolak perang dunia II dan berbagai faktor lain, pabrik gula tersebut mengalami kebangkrutan sehingga tanah bekas lokasi pabrik digunakan warga sebagai tempat pemukiman, sedangkan sumber mata air yang dulu dikelola internal oleh pabrik menjadi fasilitas umum yang dimanfaatkan warga. Walau menjadi fasilitas umum, namun karena letaknya termasuk dalam wilayah administrasi desa maka segala bentuk pendanaan, baik untuk perawatan maupun pembangunan didanai oleh desa melalui APDes. Sekitar tahun 1980-an, muncul pemikiran di kalangan aparat desa untuk

menjadikan Umbul Ponggok sebagai lokasi wisata, karena nama Umbul Ponggok sendiri sudah dikenal dan terasa ikonik bagi desa. Akhirnya pemerintah menjadikan umbul ini sebagai tempat wisata yang pengelolaannya dilakukan langsung oleh pemerintah desa menggunakan sistem *join* (kerja sama) dengan siapa saja yang ingin bergabung, terutama warga desa Ponggok, berupa kontrak dalam waktu tertentu. Seiring waktu, pemerintah desa Ponggok menilai perlu menjadikan Umbul Ponggok sebagai sumber pemasukan desa selain yang selama ini hanya melalui PADes. Pada tahun 2009 pemerintah desa Ponggok mulai mendirikan BUMDes melalui tahapan-tahapan yang di dalamnya mencakup musyawarah dengan warga desa. Masyarakat desa Ponggok juga diberi pengertian mengenai hasil akhir yang diharapkan dari pendirian BUMDes, yaitu sebagai tonggak ekonomi desa, wadah kreativitas-inovasi warga desa, mengurangi jumlah pengangguran pada angkatan kerja, dan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Proses pembentukan peraturan mengenai BUMDes Tirta Mandiri pun dilakukan dengan demokratis dan partisipatif, dengan menawarkan rancangan aturan yang telah disusun kepada warga sehingga pendapat warga dijadikan masukan dan acuan dalam penyempurnaannya. Pada tanggal 16 Desember 2009, secara resmi BUMDes Tirta Mandiri berdiri dengan diterbitkannya Peraturan desa Ponggok No. 06 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik desa. Segera setelah resmi didirikan, tim formatur menggelar rekrutmen terbuka untuk seluruh warga desa Ponggok dengan syarat dasar berusia minimal 17 tahun, yang kemudian melalui berbagai tahapan berhasil menjaring tiga orang pengurus inti, masing-masing sebagai direktur, sekretaris, dan bendahara BUMDes.

Unit usaha yang dikelola BUMDes pada awal pendirian yaitu (1) pariwisata; (2) air bersih; (3) kios kuliner; dan (4) jasa pembayaran berbagai pajak. Masalah utama setelah berdirinya BUMDes adalah permodalan. BPD dan pemerintah desa Ponggok kemudian bersepakat untuk memberi hibah senilai Rp100 Juta kepada BUMDes sebagai modal awal yang bersumber dari APBDes berjalan, yaitu APBDes tahun 2009. Meskipun memiliki modal awal Rp100 Juta, BUMDes Tirta Mandiri tidak langsung dapat menghasilkan keuntungan. Melihat hal tersebut, pemerintah desa Ponggok kembali memberikan dukungan pendanaan dengan membuat plot khusus anggaran penyelenggaraan pariwisata yang dikelola BUMDes di dalam APBDes berjalan.

Kontribusi yang diharapkan oleh pemerintah desa kepada BUMDes mulanya adalah sebesar 80 juta rupiah per tahun yang disetorkan sebagai PADes, namun kemudian kebijakan itu diganti pada tahun 2013 dengan tanggung jawab kontribusi sebesar 30% dari laba bersih BUMDes per tahun.

Proses perekrutan tenaga kerja untuk seluruh unit usaha BUMDes dilakukan dengan sistem 80% tenaga kerja yang berasal dari desa Ponggok dan 20% tenaga kerja dari luar Ponggok atau sesuai kebutuhan. Beberapa jenis tenaga kerja profesional yang direkrut oleh BUMDes Tirta Mandiri antara lain: tim SAR, marketing, dan fotografer bawah air 'under water'. HRD BUMDes Tirta Mandiri menjelaskan salah satu alasan mengambil tenaga profesional sebagai karyawan di unit usaha Umbul Ponggok, misalnya Tim SAR, adalah untuk mengantisipasi kemungkinan kecelakaan karena pariwisata kelolaan BUMDes bergerak di bidang pariwisata air. Secara umum, usaha manajemen BUMDes Tirta Mandiri dalam memperbaiki kualitas BUMDesnya adalah melalui:

1. Menjalinkan kerjasama dengan pihak konsultan, karena manajemen menyadari ada beberapa bidang yang belum bisa dikelola dengan baik jika hanya dengan SDM yang ada di dalam bumdes
2. Menggenjot produk wisata bumdes dari sisi marketing dengan biaya yang murah dan efisien, yaitu melalui media sosial (*Twitter, Facebook, Instagram*)
3. Disiplin administrasi dan pembentukan karakter SDM.

Beberapa dampak positif yang dihasilkan mulai tampak pada tahun 2013 dan sejauh ini mencapai puncaknya pada tahun 2016. Dalam tiga tahun tersebut terjadi lonjakan pengunjung ke Umbul Ponggok sehingga berdampak pada peningkatan omzet Umbul Ponggok. Sejauh ini, divisi HRD sudah melakukan penilaian personal karyawan BUMDes secara periodik setiap bulannya. Penilaian itu menyangkut absensi, kreativitas, dan kedisiplinan mengenai ketepatan waktu datang dan pulang, kerapian pakaian, kepatuhan untuk tidak merokok, bermain HP saat jam kerja, dan kegiatan-kegiatan yang melanggar etika pelayanan. Unit usaha yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri saat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikelola saat awal pendirian. Mulai tahun 2016 sampai 2017, manajemen BUMDes memutuskan untuk mengubah status unit-unit usaha BUMDes Tirta Mandiri menjadi usaha yang berbadan hukum. Beberapa unit usaha

BUMDes Tirta Mandiri yang sudah berbadan hukum, yaitu:

1. PT. Umbul Ponggok

Unit usaha ini bergerak dalam bidang pariwisata berupa pengelolaan sumber mata air yang menawarkan pengalaman menyelam/ *snorkeling* dan foto di bawah air dengan berbagai atribut dan pemandangan ikan-ikan hias. Di dalam lokasi Umbul Ponggok, dibangun kios-kios yang disewakan kepada warga desa Ponggok dengan biaya sewa Rp2.500.000,- per tahun. Penyewa kios juga dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000,- setiap kali berjualan.

2. PT. Ponggok Ciblon

Pada saat penelitian ini dilakukan, Ponggok Ciblon masih dalam tahap rintisan dan pengunjung yang datang tidak sebanyak di Umbul Ponggok. Di seberang obyek wisata ini terdapat jejeran kios kuliner yang juga dikelola oleh BUMDes dan disewakan baik kepada warga desa Ponggok maupun luar Ponggok. Biaya sewa kios ini sebesar Rp1.500.000,- per tahun dan retribusi Rp3.000,- per hari setiap kali beroperasi.

3. PT. Sumber Panguripan

Unit usaha ini berbentuk toko desa mirip seperti mini market. Bukan hanya menjual berbagai kebutuhan rumah tangga pada umumnya, namun toko ini menjadi penyalur produk-produk usaha warga desa Ponggok, seperti UKM Nila Murni yang memproduksi panganan berbahan dasar ikan nila. UKM ini dijalankan oleh kaum wanita khususnya ibu-ibu rumah tangga. Selain itu, toko desa Sumber Panguripan juga menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK). RPK merupakan salah satu program Bulog yang bertujuan menyuplai bahan pangan yang terjangkau sekaligus menstabilkan harga bahan pangan.

Unit usaha yang juga tidak kalah pentingnya adalah usaha pengelolaan jaringan air bersih desa. Sebelum dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri pada 2009, warga desa Ponggok biasa menggunakan sumur atau langsung mengambil dari Umbul Ponggok. Jaringan air bersih yang dikelola BUMDes Tirta Mandiri ini bertujuan menjamin kelayakan air minum bagi warga dan menumbuhkan sikap bijak dalam menggunakan air. Retribusi yang dibebankan kepada warga dinilai relatif murah, sebesar Rp6.000,- untuk setiap 1-15 kubik air bersih per bulan. Selebihnya dikenai tarif Rp600,- per kubik. Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri telah mendatangkan banyak kunjungan, baik berupa kunjungan kedinasan oleh

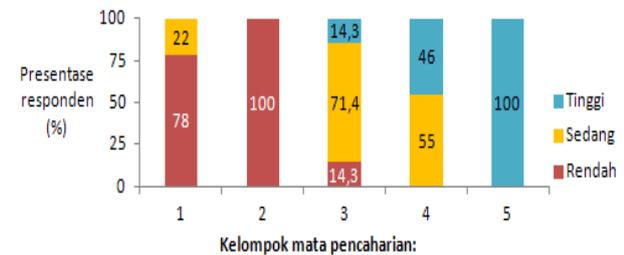
pejabat negara, studi banding, hingga kunjungan untuk tujuan riset, magang, atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa. Hal ini menjadi peluang yang dimanfaatkan BUMDes Tirta Mandiri untuk mengembangkan unit usaha lain yaitu unit usaha studi desa. Setiap kunjungan yang bersifat kedinasan, studi banding, biasanya membutuhkan akomodasi dan konsumsi. Disinilah peran BUMDes dalam memberdayakan ibu-ibu PKK dengan menggunakan jasa PKK untuk menyiapkan konsumsi sehingga menambah penghasilan bagi anggota PKK. Penggunaan gedung serba guna (GSG) yang terletak di samping kantor desa Ponggok juga meningkat seiring banyaknya kunjungan ke desa ini. Biasanya, dalam kunjungan yang membawa banyak peserta, dibutuhkan banyak kursi pula. Sebagian kursi yang ada di kantor desa merupakan aset RW 4, sehingga setiap ada acara di kantor desa menjadi pemasukan bagi kas RW 4.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan rumah tangga akan dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian utama kepala keluarganya sehingga total skor yang didapat dari lima belas variabel kesejahteraan merupakan skor akhir yang menentukan tingkat kesejahtraannya. Salah satu variabel kesejahteraan adalah tingkat pendapatan. Berdasarkan data di lapangan, pendapatan responden terendah sebesar Rp300.000,- dan yang tertinggi sebesar Rp6.000.000,-. Jika dirata-rata, pendapatan responden adalah Rp2.911.667,- dengan standar deviasi Rp1.420.702,- sehingga dapat dibuat klasifikasi tingkat pendapatan sebagai berikut:

1. Rendah : $x \leq \text{Rp}2.201.316,-$
2. Sedang : $\text{Rp}2.201.316,- < x < \text{Rp}3.622.018,-$
3. Tinggi : $x \geq \text{Rp}3.622.018,-$

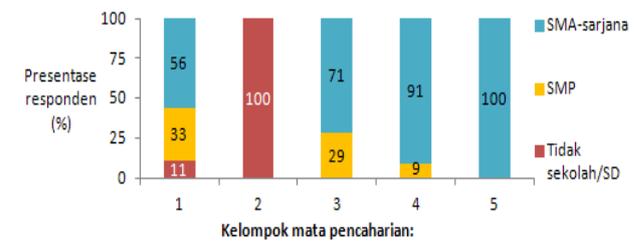
Jumlah responden berdasarkan tingkat pendapatannya disajikan dalam tabel 2.



Gambar 3 Distribusi tingkat pendapatan keluarga responden pada masing-masing kelompok mata pencaharian utama (dalam %)

Tingkat pendapatan pada masing-masing kelompok mata pencaharian utama kepala keluarga responden disajikan pada gambar 3. Terlihat bahwa responden dengan tingkat pendapatan rendah berada pada kelompok buruh, petani, dan pedagang/ wiraswasta, meski pada kelompok terakhir persentasenya sangat kecil. Semakin ke kanan, grafik menunjukkan gambaran tingkat pendapatan yang semakin tinggi.

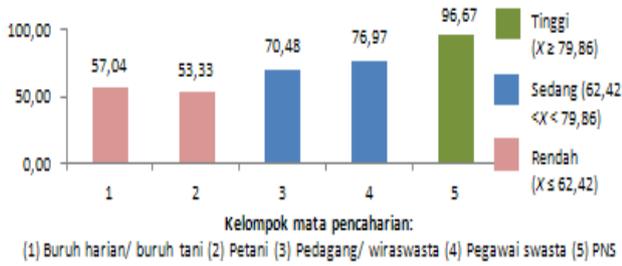
Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh kepala keluarga, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA atau yang setara, disusul SMP, serta yang paling sedikit adalah SD dan perguruan tinggi. Distribusi tingkat pendidikan responden per kelompok mata pencaharian (dalam %) dapat dilihat pada Gambar 4. Dalam kelompok mata pencaharian buruh dan petani masih terdapat responden yang hanya menempuh pendidikan SD atau tidak sekolah. Semakin ke kanan, pendidikan tingkat SD dan SMP semakin rendah persentasenya, dan pendidikan SMA/ perguruan tinggi semakin meningkat persentasenya. Jika dihubungkan dengan grafik distribusi tingkat pendapatan, responden dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pula.



Gambar 4 Distribusi tingkat pendidikan kepala keluarga responden pada masing-masing kelompok mata pencaharian utama (dalam %)

Tingkat kesejahteraan merupakan indeks komposit yang menggabungkan skor dari seluruh variabel. Setiap variabel kesejahteraan memiliki tiga pilihan jawaban dengan klasifikasi tinggi, sedang, dan rendah. Namun hanya pilihan jawaban dengan kategori 'tinggi' yang akan dilihat sebagai indikator yang merepresentasikan keadaan sejahtera dan diberi skor 100. Selanjutnya disajikan grafik hasil perhitungan indeks komposit kesejahteraan responden berdasarkan mata pencaharian utama kepala keluarganya agar posisi masing-masing kelompok rumah tangga diantara yang lainnya semakin terlihat. berdasarkan kelompok mata pencaharian. Tingkat kesejahteraan tinggi dialami oleh rumah tangga responden dengan mata pencaharian utama kepala keluarganya PNS,

kesejahteraan sedang oleh kelompok pedagang/ wiraswasta dan pegawai swasta, dan kesejahteraan rendah oleh kelompok buruh harian/ buruh tani dan petani (Gambar 5).



Gambar 5 Indeks komposit tingkat kesejahteraan

Dari keseluruhan responden, mayoritas berada pada tingkat kesejahteraan sedang. Jumlah responden pada masing-masing kategori tingkat kesejahteraan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4 Jumlah responden berdasarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di desa Ponggok tahun 2018

Tingkat kesejahteraan	n	%
Rendah	10	33,3
Sedang	18	60
Tinggi	2	6,7
Total	30	100

Dalam konteks penelitian ini, rumah tangga responden selanjutnya terbagi menjadi tiga lapisan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, yaitu:

1. Masyarakat lapisan bawah

Responden bermata pencaharian utama sebagai PNS. Kelompok ini menduduki tingkat kesejahteraan tertinggi dengan indeks sebesar 96,67. Artinya, hampir semua aspek yang diukur untuk menilai tingkat kesejahteraan menunjukkan penilaian yang tinggi. Faktor utama yang menyebabkan kelompok ini berada di lapisan atas adalah kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi ini disokong dengan tingginya pendapatan sebagai PNS dan kepemilikan gaji yang tetap setiap bulannya serta tunjangan-tunjangan lain. Pendapatan responden dari lapisan atas ini yang terendah adalah sebesar Rp5.000.000,- per bulan. Pendapatan yang dihasilkan setiap bulannya juga relatif tinggi karena istri responden juga memiliki pekerjaan di sektor formal. Tingkat pendidikan dari kelompok responden ini merupakan yang tertinggi, karena semuanya berpendidikan sarjana. Kepemilikan sumber daya didukung dengan kualitas pendidikan yang memadai membuat lapisan atas masyarakat dapat mengoptimalkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki untuk

meningkatkan kesejahteraannya. Semua responden dalam kelompok ini tercatat memiliki investasi di BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, kelompok ini juga memiliki usaha lain di luar pekerjaan utamanya. Selain kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan yang tinggi, lapisan atas masyarakat ini juga menjadi bagian penting karena peranannya di masyarakat, seperti responden HAJ yang berkedudukan sebagai ketua Pokdarwis RW 3.

2. Masyarakat lapisan tengah

Responden pencaharian utama sebagai pedagang/ wiraswasta, dan pegawai swasta dengan indeks kesejahteraan sebesar 73,72. Persentase penduduk bermatapencaharian pegawai swasta merupakan yang terbesar di desa Ponggok, mencapai 42,2%, sedangkan profesi wiraswasta/ pedagang menempati urutan kedua persentase terbanyak warga desa Ponggok. Tingginya presentase penduduk yang bermatapencaharian sebagai pegawai swasta tidak terlepas dari kehadiran PT TIV Aqua Klaten di desa Ponggok sejak tahun 2000. Sementara itu, kehadiran berbagai arena wisata yang memanfaatkan potensi alam berupa mata air turut mendorong tumbuhnya para pedagang dan wiraswasta. Hampir seluruh responden lapisan tengah ini memiliki tingkat pendapatan sedang (lihat kembali Gambar 3), dengan pendapatan terkecil Rp1.700.000,- dan yang terbesar Rp6.000.000,-. Responden dalam lapisan tengah yang berprofesi sebagai pedagang dengan pendapatan berkisar antara 2 hingga 3 Juta Rupiah umumnya hanya menjalankan satu usaha yaitu berdagang, dan pasangan hidupnya tidak memiliki pekerjaan atau hanya bekerja membantu suami. Di sisi lain, pedagang yang memiliki pendapatan lebih dari 3 juta rupiah biasanya memiliki jenis usaha lain, seperti jasa penginapan 'homestay', memiliki investasi berupa akuisisi alat-alat snorkeling di Umbul Ponggok, atau istrinya ikut dalam kegiatan produksi di UKM Nila Murni. Masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai swasta dalam penelitian ini bekerja di PT TIV Aqua Klaten dan menjadi sejahtera lewat gaji tetap ditambah berbagai tunjangan bagi seluruh anggota keluarganya. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas merupakan lulusan SMA atau yang setara, meskipun pada kelompok pedagang/ wiraswasta persentase responden yang berpendidikan SMP masih lebih tinggi dibanding pada kelompok pegawai swasta (lihat kembali Gambar 4). Pendidikan setingkat SMA ini membuat kesempatan mereka untuk bekerja di bidang industri menjadi lebih besar.

3. Masyarakat lapisan bawah

Responden bermata pencaharian utama sebagai buruh dan petani. Masing-masing kelompok mata pencaharian tersebut memiliki indeks kesejahteraan sebesar 57,04 dan 53,3. Pendapatan masyarakat lapisan bawah sebagian besar berada pada tingkat pendapatan rendah, dengan pendapatan terkecil sebesar Rp300.000,-. Mayoritas responden memiliki pendapat sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah. Pendapatan terkecil dialami oleh responden bermatapencaharian petani. Meski responden dalam kelompok ini tercatat sebagai buruh pada data monografi desa Ponggok, pada kenyataannya sebagian dari mereka beralih profesi menjadi pedagang kecil dan ada pula yang bekerja di unit usaha Umbul Ponggok sebagai petugas kebersihan kolam dan penjaga parkir. Responden yang berprofesi sebagai pedagang dalam kelompok ini bukanlah pedagang yang memiliki warung sendiri apalagi menyewa kios, namun berdagang secara kecil-kecilan. Dari sisi pendidikan, meskipun kontribusi persentase pendidikan SMA terhadap total responden di kelompok buruh adalah yang tertinggi, namun kontribusi persentase tingkat pendidikan SMP dan SD/tidak sekolah terhadap kedua kelompok ini juga yang tertinggi dibanding kelompok mata pencaharian lainnya (lihat Kembali Gambar 4). Bahkan pada responden bermatapencaharian petani, ia tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Tingkat pendidikan yang rendah pada responden lapisan bawah dapat menjadi sebab ketidakpastian pekerjaan yang mengakibatkan kelompok ini sering cenderung beralih-alih profesi dibanding responden dari lapisan atas dan tengah.

Hubungan Manfaat Bumdes Tirta Mandiri Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

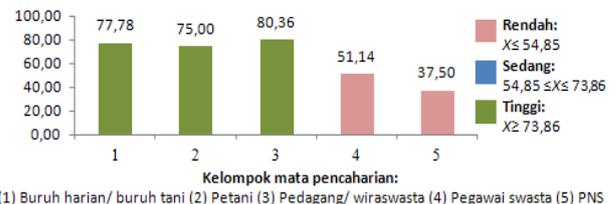
Tingkat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran BUMDes disajikan pada tabel 5.

Tabel 5 Jumlah dan presentase tingkat manfaat BUMDes Tirta Mandiri bagi responden di desa Ponggok tahun 2018

Tingkat manfaat BUMDes	N	%
Rendah	13	43,3
Sedang	0	0
Tinggi	17	56,7
Total	30	100

Mayoritas responden (56,7%) merasakan manfaat dari kehadiran BUMDes Tirta Mandiri pada tingkat yang tinggi, disusul dengan tingkat manfaat rendah

sebesar 43,3%. Jika dirinci berdasarkan mata pencaharian utama kepala keluarga, manfaat BUMDes pada tingkat yang tinggi dirasakan oleh responden kelompok mata pencaharian buruh, petani, dan pedagang atau wiraswasta. Sedangkan kelompok mata pencaharian pegawai swasta dan PNS merasakan manfaat yang rendah seperti disajikan pada gambar berikut.



Gambar 6 Indeks komposit tingkat manfaat Bumdes menurut kelompok mata pencaharian

Untuk melihat hubungan antara manfaat BUMDes Tirta Mandiri dengan kesejahteraan masyarakat, disajikan melalui tabulasi silang dan uji korelasi.

Tabel 6 Jumlah dan presentase tingkat manfaat BUMDes Tirta Mandiri bagi responden berdasarkan tingkat kesejahteraan di desa Ponggok tahun 2018

Tingkat Kesejahteraan	Manfaat Bumdes						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Rendah	0	0	0	0	10	100	10	100
Sedang	11	61,1	0	0	7	38,9	18	100
Tinggi	2	100	0	0	0	0	2	100
Total	13	43,3	0	0	17	56,7	30	100

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat kecenderungan responden dengan tingkat kesejahteraan rendah mendapat manfaat atas kehadiran BUMDes Tirta Mandiri dalam tingkat yang tinggi, dan sebaliknya. Ketika diuji menggunakan uji korelasi *rank spearman*, didapatkan nilai *sig (2 tailed)* sebesar 0,00 yang berarti terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel. Nilai koefisien korelasi sebesar -0,647 menunjukkan hubungan korelasi yang kuat dan arah hubungan tidak searah. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin rendah tingkat manfaat BUMDes Tirta Mandiri yang dirasakan. Untuk menganalisis hal ini, akan dijelaskan mengenai manfaat BUMDes Tirta Mandiri secara ekonomi maupun sosial.

1. Manfaat Ekonomi BUMDes Tirta Mandiri

Manfaat ekonomi BUMDes Tirta Mandiri yang dirasakan oleh rumah tangga responden diukur melalui tiga pertanyaan, yaitu tambahan penghasilan, keikutsertaan dalam investasi di BUMDes, dan

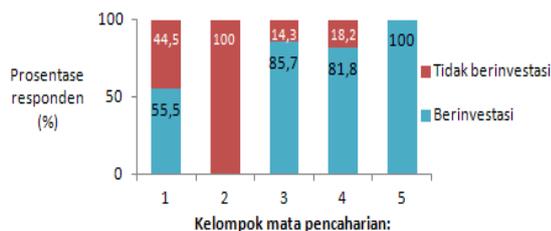
tersedianya lapangan pekerjaan. Tabel 7 memuat jawaban responden mengenai manfaat ekonomi yang didapat dari kehadiran BUMDes Tirta Mandiri. jumlah dan persentase responden yang menjawab “ya” dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari BUMDes Tirta mandiri selalu lebih banyak dibanding jawaban “tidak” untuk ketiga indikator.

Tabel 7 Penilaian responden mengenai manfaat Ekonomi BUMDes Tirta Mandiri di desa Ponggok tahun 2018

Kategori Jawaban	Manfaat Ekonomi (X1)					
	X1.1 (n)	%	X1.2 (n)	%	X1.3 (n)	%
Ya	22	73,3	21	70	17	56,7
Tidak	8	26,7	9	30	14	43,3
Total	30	100	30	100	30	100

- X1.1 : Saya berinvestasi di BUMDes
- X1.2 : Lapangan pekerjaan semakin banyak dan beragam
- X1.3 : Saya mendapat tambahan penghasilan

Pada indikator keikutsertaan responden dalam berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri (X1.1), responden yang menyatakan bahwa mereka berinvestasi di BUMDes sebanyak 22 orang atau 73,3% dari total responden. Hal ini tidak terlepas dari upaya BUMDes Tirta Mandiri dalam mendorong warganya berinvestasi melalui penyediaan pilihan saham yang terjangkau bagi masyarakat. Dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial, BUMDes Tirta Mandiri membatasi pembelian saham dengan aturan satu kartu keluarga-satu saham. BUMDes Tirta Mandiri juga menerapkan aturan khusus mengenai investasi, misalnya bagi pemilik usaha alat-alat snorkeling yang asetnya diakuisisi oleh BUMDes. Investor dalam kelompok ini bisa melakukan investasi hingga Rp25 juta. Selain itu, investor berbentuk lembaga seperti RT, RW, Karang Taruna, dapat berinvestasi sampai Rp50 juta.



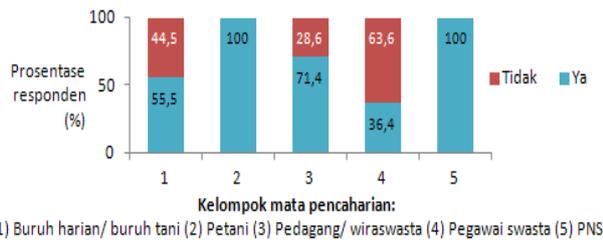
Gambar 7 Persentase responden yang berinvestasi dan tidak berinvestasi di BUMDes Tirta Mandiri menurut kelompok mata pencaharian

Terlihat pada Gambar 7, sebanyak 100% responden dari kelompok mata pencaharian PNS berinvestasi di

BUMDes. Sebaliknya, responden dari kelompok mata pencaharian petani tidak berinvestasi. Hal yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi umumnya adalah kemampuan finansial. Pada kelompok pedagang/wiraswasta, keikutsertaan dalam investasi di BUMDes umumnya didorong kedekatan hubungan mata pencaharian ini dengan usaha yang dijalankan BUMDes di bidang pariwisata dan kios kuliner. Dari kelompok mata pencaharian buruh, mereka yang berinvestasi merasa tertarik dengan sistem investasi di BUMDes Tirta Mandiri yang mudah dan terjangkau, dan bertujuan ‘menyimpan’ uang sekaligus mendapat keuntungan. Sementara itu, kelompok buruh dan pedagang yang tidak mengikuti investasi rata-rata dikarenakan alasan finansial dan kurangnya pengetahuan mengenai BUMDes dan sistem investasi yang ditawarkan.

Selanjutnya, responden diminta untuk menilai ketersediaan lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan beragam dengan adanya BUMDes Tirta Mandiri. Sebanyak 70% responden menyatakan lapangan pekerjaan bertambah dan beragam. Sampai saat penelitian ini dilakukan (2018), total warga yang diserap oleh BUMDes Tirta Mandiri sebagai pekerja sudah mencapai 70 orang, dan dimungkinkan bertambah seiring perkembangan usaha BUMDes Tirta Mandiri. Selain diserap secara langsung sebagai tenaga kerja di unit-unit usaha BUMDes, masyarakat juga merasa lapangan pekerjaan bertambah karena keberhasilan pengembangan pariwisata Umbul Ponggok. Lonjakan pengunjung khususnya di hari libur mendorong dibukanya usaha parkir di lahan-lahan warga sekitar Umbul Ponggok yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat, baik per RT maupun per RW. Fasilitas umum lainnya yang dibangun dan dibisniskan secara kolektif lainnya adalah toilet umum di sekitar Umbul Ponggok yang pengadaannya disokong pula oleh BUMDes Tirta Mandiri. Sementara itu, sebanyak 30% responden yang tidak merasa adanya peningkatan jumlah dan ragam lapangan pekerjaan berpendapat bahwa terbukanya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar bukan dikarenakan keberadaan BUMDes Tirta Mandiri, namun karena keberadaan PT TIV Aqua Klaten sejak tahun 2000.

Butir pertanyaan ketiga (X1.3) pada Tabel 7 mengenai ada atau tidaknya tambahan penghasilan yang didapatkan, memperlihatkan persentase jawaban “Ya-Tidak” oleh responden tidak begitu berbeda. Distribusinya menurut kelompok mata pencaharian disajikan pada gambar berikut.



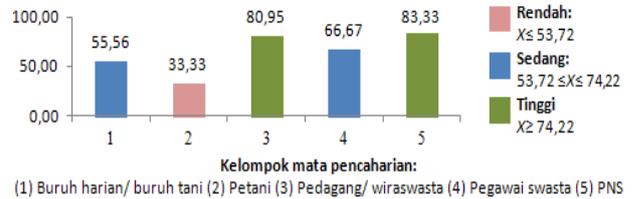
Gambar 8 Persentase responden yang mendapatkan tambahan penghasilan menurut kelompok mata pencaharian

Kelompok mata pencaharian dengan responden terbanyak yang mendapat tambahan penghasilan adalah dari kelompok PNS dan petani. Kelompok PNS dan sebagian kelompok pegawai swasta mendapat tambahan penghasilan melalui keikutsertaannya pada investasi dan adanya usaha sampingan yang keuntungannya turut meningkat seiring ramainya kunjungan wisatawan. Responden bermatapencaharian petani –dalam penelitian ini hanya satu orang– mendapat tambahan penghasilan dari keikutsertaannya dalam UKM Nilai Murni. Responden yang juga menyatakan mendapat tambahan penghasilan berasal dari kelompok mata pencaharian pedagang. Ramainya pengunjung Umbul Ponggok turut berdampak pada peningkatan penghasilan warga yang berprofesi sebagai pedagang/wiraswasta. Sebagian pedagang yang tidak merasa mendapat tambahan penghasilan beralasan kunjungan wisatawan ke Umbul Ponggok sedang merosot pada saat penelitian ini dilakukan. Kelompok buruh mendapat tambahan penghasilan dari pekerjaan sampingan seperti menjaga parkir secara bergilir, atau dikarenakan istrinya ikut dalam produksi camilan di UKM Nila Murni, sedangkan yang tidak mendapat tambahan penghasilan karena ketidaksertaannya dalam investasi di BUMDes. Pada kelompok pegawai swasta, lebih banyak yang berpendapat tidak mendapat tambahan penghasilan karena keuntungan dari investasi yang tidak lagi terlalu besar sehingga tidak berdampak pada tambahan penghasilan mereka.

Hubungan Tingkat Manfaat Ekonomi BUMDes dengan Tingkat Kesejahteraan

Tingkat manfaat ekonomi BUMDes Tirta Mandiri dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan mata pencahariannya, sehingga total skor yang didapat dari 3 butir pertanyaan mengenai manfaat ekonomi merupakan skor akhir yang menentukan kategori tingkat manfaatnya, yaitu rendah, sedang dan tinggi (lihat Gambar 9). Reponden yang

merasakan tingkat manfaat ekonomi kategori tinggi berasal dari kelompok mata pencaharian pedagang/wiraswasta dan PNS. Kelompok mata pencaharian buruh dan pegawai swasta merasakan manfaat ekonomi BUMDes pada kategori sedang, sedangkan responden bermatapencaharian petani merasakan manfaat ekonomi pada tingkat rendah.



Gambar 9 Indeks komposit tingkat manfaat ekonomi BUMDes menurut kelompok mata pencaharian

Untuk melihat hubungan tingkat manfaat ekonomi BUMDes Tirta Mandiri dengan kesejahteraan, disajikan tabulasi silang pada tabel berikut.

Tabel 8 Jumlah dan presentase tingkat manfaat ekonomi BUMDes Tirta Mandiri bagi responden berdasarkan tingkat kesejahteraan di desa Ponggok tahun 2018

Tingkat Kesejahteraan	Manfaat ekonomi						Total	
	Rendah		Sedang		Tinggi		n	%
	n	%	n	%	n	%		
Rendah	1	10	9	90	0	0	10	100
Sedang	0	0	11	61	7	39	18	100
Tinggi	0	0	0	0	2	100	2	100
Total	1	3,3	20	66,7	9	30	30	100

Terdapat kecenderungan pada responden dengan tingkat kesejahteraan tinggi mendapat manfaat ekonomi dari BUMDes dengan tingkat yang tinggi pula, begitupun sebaliknya. Uji korelasi rank spearman dalam hal ini menunjukkan nilai sig (2 tailed) sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan signifikan antara manfaat ekonomi BUMDes dengan tingkat kesejahteraan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,573 menandakan hubungan bersifat kuat dan searah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesejahteraan, semakin tinggi pula manfaat ekonomi dari BUMDes Tirta Mandiri yang dirasakan responden.

2. Manfaat Sosial BUMDes Tirta Mandiri

Terdapat lima butir pertanyaan untuk mengukur manfaat sosial atas keberadaan BUMDes Tirta Mandiri dalam penelitian ini, yang hasilnya disajikan pada tabel 9.

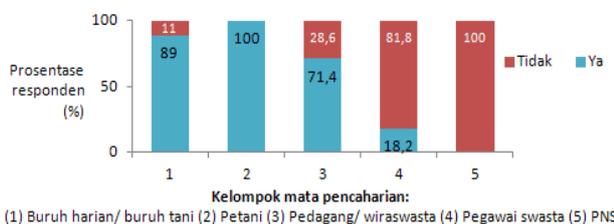
Tabel 9 Penilaian responden mengenai manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri di desa Ponggok tahun 2018

Kategori	Manfaat Sosial (X2)									
	.1		.2		.3		.4		.5	
Ja-waban	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%
Ya	16	53,3	23	76,7	17	56,7	16	53,3	27	90
Tidak	14	46,7	7	23,3	13	43,3	14	46,7	3	10
Total	30	100	30	100	30	100	30	100	30	100

X2.1 : Saya pasangan saya diberdayakan oleh desa dengan keberadaan BUMDes
 X2.2 : Saya lebih memilih mencari pekerjaan di desa Ponggok daripada merantau ke kota
 X2.3 : Kartu BPJS saya didanai oleh desa
 X2.4 : Saya merasa terbantu dengan adanya dana sosial
 X2.5 : Saya terbantu dengan adanya layanan air bersih, listrik, dan pungutan sampah melalui Bumdes

a. Berdaya dengan BUMDes Tirta Mandiri

Responden yang menyatakan bahwa dirinya atau pasangannya diberdayakan oleh desa semenjak kehadiran BUMDes Tirta Mandiri sebesar 53,3%. Bentuk pemberdayaan yang kentara dalam penelitian ini adalah terlibatnya responden dalam kegiatan UKM (usaha kecil menengah) Nila Murni yang dibentuk sejak 2012. UKM ini memang bukan bentukan BUMDes Tirta Mandiri, namun berkembangnya usaha BUMDes di bidang pariwisata dan toko desa turut menyokong keberlanjutan usaha UKM Nila Murni. BUMDes Tirta Mandiri berperan terutama dalam pemasaran produk-produk UKM Nila Murni melalui toko desa dan menyertakan produk UKM Nila Murni kemasan kecil dalam satu paket dengan tiket masuk wisata Umbul Ponggok. Responden yang mengikuti usaha produksi makanan melalui UKM Nila Murni kebanyakan berasal dari kelompok mata pencaharian buruh, petani, dan pedagang, dan kesemuanya yang melakukan adalah istrinya (lihat Gambar 10).



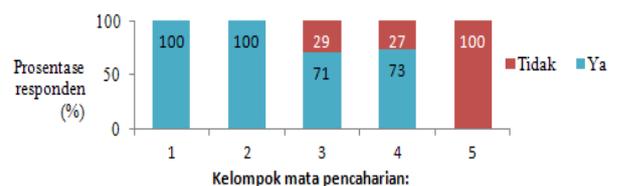
Gambar 10 Persentase responden yang diberdayakan oleh desa setelah kehadiran BUMDes menurut kelompok mata pencaharian

Kebanyakan para istri ini mengikuti kegiatan produksi di UKM Nila Murni untuk membantu perekonomian keluarga. Fluktuasi jumlah pengunjung wisata dirasa sangat berpengaruh pada produksi di UKM ini. Saat pengunjung sepi, misal saat bukan libur panjang, maka produksi biasanya hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam seminggu. Meski upah dari memproduksi makanan

di UKM Nila Murni tidak selalu banyak dan pasti, namun responden mengaku tetap senang karena dapat berkumpul bersama tetangga dan memiliki aktivitas dibanding hanya menjadi ibu rumah tangga. Responden dari kelompok mata pencaharian pegawai swasta tidak banyak yang istrinya mengikuti kegiatan produksi olahan ikan nila melalui UKM Nila Murni. Kebanyakan dari mereka berstatus ibu rumah tangga dan pendapatan suaminya dirasa sudah memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

b. Preferensi Responden untuk Menetap atau Merantau dalam Hal Pekerjaan

Pada Tabel 9 di atas, sebanyak 76,7% responden memilih untuk tetap mencari pekerjaan di desa Ponggok daripada keluar desa. Tingginya presentase ini sebenarnya bukan semata-mata dipengaruhi keberadaan BUMDes Tirta Mandiri saja. Responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta dan bekerja di PT TIV Aqua tidak ingin mencari pekerjaan di luar desa karena merasa pekerjaannya saat ini sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun beberapa dari responden juga tidak merasa keberatan jika anggota keluarganya ingin merantau dalam bekerja. Umumnya mereka memiliki anak yang berpendidikan tinggi sehingga lapangan pekerjaan di desa Ponggok dirasa tidak mencukupi untuk anaknya dalam bekerja sesuai bidang studi yang telah ditempuhnya.



(1) Buruh harian/ buruh tani (2) Petani (3) Pedagang/ wiraswasta (4) Pegawai swasta (5) PNS

Gambar 11 Persentase responden yang memilih menetap di desa Ponggok dalam hal pekerjaan

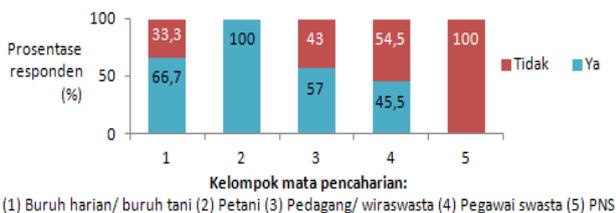
BUMDes Tirta Mandiri cukup berhasil membuat iklim desa yang optimistis dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Responden banyak yang menilai positif akan perkembangan BUMDes dan optimis dapat menyerap lebih banyak pekerja lagi di masa yang akan datang.

c. Jaminan Kesehatan dan Dana Sosial BUMDes Tirta Mandiri

Hasil usaha BUMDes Tirta Mandiri sebesar 30% disetor sebagai PADes dan masuk dalam pos APBDes. Dana tersebut kemudian oleh desa disalurkan kembali kepada masyarakat untuk

berbagai kebutuhan. Salah satu yang paling terasa secara langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah terjaminnya kesehatan warga di tingkat dasar dengan penanggungungan premi BPJS golongan III oleh pemerintah desa. Pemberian fasilitas BPJS gratis ini diperuntukkan bagi seluruh warga desa Ponggok yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan, tanpa memandang status keluarga mampu maupun tidak mampu. Menurut pengurus BUMDes, pemberian fasilitas tanpa memandang status bagi seluruh warga desa Ponggok menjadi hal yang harus dilakukan karena sudah seyogyanya manfaat BUMDes dirasakan oleh semua masyarakat. Dari kelima kelompok mata pencaharian, kelompok Buruh, Petani, dan Pedagang/wirasasta (56,7%) seluruhnya memiliki kartu BPJS yang dibiayai oleh pemerintah desa lewat hasil usaha BUMDes Tirta Mandiri, sedangkan kelompok pegawai swasta dan PNS sudah memiliki kartu jaminan kesehatan yang dibiayai oleh institusi atau perusahaannya sehingga tidak lagi menjadi tanggungan BUMDes.

Desa Ponggok memiliki lembaga pengelolaan amal dan zakat yang sudah memiliki badan hukum dan izin kegiatan. Lembaga ini merupakan lembaga yang juga bersentuhan langsung dengan BUMDes Tirta Mandiri. Setiap karyawan yang bekerja di BUMDes, gajinya otomatis akan disalurkan 2,5% setiap bulan melalui Lazizawa sebagai bentuk infak. Selain itu, dalam setiap penjualan satu tiket masuk wisata Umbul Ponggok, BUMDes Tirta Mandiri menyalurkan Rp1000 melalui lembaga ini. Dana-dana amal yang dialirkan oleh BUMDes Tirta Mandiri selanjutnya dikelola oleh Lazizawa secara independen untuk disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk santunan kepada anak yatim, jompo, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula program satu rumah satu sarjana, program paket sembako setiap hari raya, dan beasiswa bagi anak sekolah yang berprestasi.



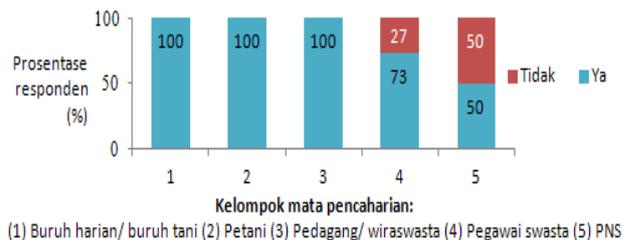
Gambar 12 Persentase responden yang merasa terbantu dengan adanya dana sosial BUMDes menurut kelompok mata pencaharian

Sebagian besar responden yang merasa terbantu dengan adanya dana sosial ini berasal dari kelompok

mata pencaharian Buruh, Petani, dan Pedagang/wirasasta. Bagi ketiga kelompok ini, meski bantuan tidak terlalu besar secara nominal namun mereka merasa bantuan tersebut sangat berarti.

d. Terbantu dengan Jasa Air Bersih, Listrik, dan Kebersihan

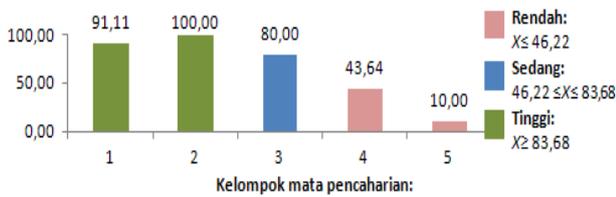
Unit usaha yang dijalankan BUMDes Tirta Mandiri tidak terlepas dari upayanya menjadikan BUMDes tetap berpegang pada prinsip keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Hal ini mendasari BUMDes Tirta Mandiri melakukan usaha air bersih yang terjangkau bagi warga, yang sering disebut warga PAM desa. Pemasangan PAM desa di setiap rumah tangga dilakukan secara gratis, begitu juga pemasangan listrik bagi rumah tangga yang belum teraliri listrik. Selain itu, terdapat juga jasa pengangkutan sampah rumah tangga yang dibuang ke TPA milik desa Ponggok sendiri dengan biaya yang juga terjangkau. Sebanyak 90% responden merasa terbantu dengan adanya jasa seperti ini, terlebih bagi responden dari buruh, petani, dan pedagang (Gambar 13) yang menyatakan jasa ini memberikan kemudahan dan terjangkau secara ekonomis.



Gambar 13 Persentase responden yang merasa terbantu dengan jasa air bersih, listrik, dan kebersihan menurut kelompok mata pencaharian

Hubungan Tingkat Manfaat Sosial BUMDes Tirta Mandiri dengan Tingkat Kesejahteraan

Sebagaimana penghitungan mengenai tingkat manfaat ekonominya, tingkat manfaat sosial dari BUMDes Tirta Mandiri juga diukur dengan menggabungkan skor yang diperoleh masing-masing kelompok mata pencaharian pada setiap variabel mengenai manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri. Total skor tersebut kemudian dicari standar deviasinya untuk menentukan batas-batas klasifikasi tingkat manfaat sosial yang rendah, sedang, dan tinggi. Terlihat pada Gambar 14, kelompok responden yang merasakan tingkat manfaat sosial yang tinggi dari kehadiran BUMDes Tirta Mandiri berasal dari kelompok buruh dan petani.



(1) Buruh harian/ buruh tani (2) Petani (3) Pedagang/ wiraswasta (4) Pegawai swasta (5) PNS

Gambar 14 Indeks komposit tingkat manfaat sosial Bumdes menurut kelompok mata pencaharian

Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa usaha-usaha yang dilakukan BUMDes bukan hanya berorientasi pada profit namun juga berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain seperti penyediaan air bersih, listrik, dan jaminan kesehatan. Banyak dari masyarakat lapisan bawah yang sebelum kehadiran BUMDes tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, belum mendapatkan jaminan kualitas air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan cenderung mencari pekerjaan di luar daerah sehingga meningkatkan potensi urbanisasi. Setelah BUMDes Tirta Mandiri mengorganisir sumber daya-sumber daya yang ada di desa Ponggok, masyarakat lapisan bawah merasakan manfaat atas kehadirannya meski bukan dalam bentuk profit ekonomi secara langsung. Program-program sosial seperti pembagian THR berupa sembako menjelang hari raya, pembuatan dan penanggungjanaan premi kartu jaminan kesehatan –meskipun menyasar semua lapisan tanpa membedakan tingkat kesejahteraan– memiliki efek yang berbeda pada lapisan masyarakat bawah. Kebermanfaatannya dirasakan secara lebih positif oleh masyarakat lapisan bawah, karena keterbatasan ekonomi mereka menjadi tidak menghalanginya untuk mendapatkan hak-hak dasar yang relatif sama dengan kelompok masyarakat lapisan sedang dan tinggi. Sementara itu, responden yang berasal dari kelompok mata pencaharian pegawai swasta dan PNS merasakan manfaat sosial BUMDes pada tingkat yang rendah karena pemenuhan kebutuhan sosial mereka seperti jaminan kesehatan bukan dilakukan oleh BUMDes melainkan oleh institusi tempat mereka bekerja. Untuk melihat hubungan antara tingkat manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri dengan kesejahteraan, disajikan tabulasi silang pada Tabel 10. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat kecenderungan responden dengan tingkat kesejahteraan rendah mendapat manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri pada tingkat yang tinggi, begitupun sebaliknya.

Tabel 10 Jumlah dan presentase tingkat manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri bagi

responden berdasarkan tingkat kesejahteraan di desa Ponggok tahun 2018

Tingkat Kesejahteraan	Manfaat sosial							
	Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Rendah	0	0	0	0	10	100	10	100
Sedang	11	61,1	7	38,9	0	0	18	100
Tinggi	2	100	0	0	0	0	2	100
Total	13	43,3	7	23,4	10	33,3	30	100

Uji korelasi rank spearman dalam hal ini menunjukkan nilai *sig (2 tailed)* sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara manfaat sosial BUMDes dengan tingkat kesejahteraan. Nilai koefisien korelasi sebesar $-0,866$ menunjukkan hubungan antara kedua variabel bersifat kuat dan tidak searah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesejahteraan responden, kecenderungannya untuk mendapat manfaat sosial BUMDes Tirta Mandiri semakin rendah. Hasil uji ini juga menjadi tanda bahwa kehadiran BUMDes Tirta Mandiri di desa Ponggok menjadi penting lewat perannya dalam memberi manfaat-manfaat sosial khususnya pada masyarakat lapisan bawah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini, ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kesejahteraan rumah tangga di Desa Ponggok 60% berada pada tingkat kesejahteraan sedang
2. Tingkat kesejahteraan paling tinggi memiliki mata pencaharian utama sebagai PNS, dengan indeks kesejahteraan sebesar 96,67. Sementara itu, tingkat kesejahteraan terendah memiliki mata pencaharian sebagai petani dengan indeks kesejahteraan sebesar 53,33. Rumah tangga petani dan buruh menduduki lapisan masyarakat bawah dengan pendapatan terkecil sebesar Rp300.000,- per bulan
3. Bentuk manfaat ekonomi atas kehadiran BUMDes Tirta Mandiri yang dirasakan masyarakat berupa terbukanya kesempatan berinvestasi, tersedianya lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan beragam, dan tambahan penghasilan. Di sisi lain, manfaat sosial yang diberikan BUMDes Tirta Mandiri hadir dalam bentuk pemberdayaan UKM, menghambat urbanisasi, pemberian jaminan kesehatan dan dana sosial, serta penyediaan air bersih, pengangkutan sampah, dan pemerataan listrik. Responden dengan tingkat kesejahteraan tinggi cenderung mendapat manfaat ekonomi

sedangkan responden dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung mendapat manfaat sosial yang lebih besar dari kehadiran BUMDes Tirta Mandiri

4. Hubungan antara manfaat BUMDes Tirta Mandiri dengan tingkat kesejahteraan bersifat kuat dan tidak searah. Uji statistik korelasi Rank Spearman dalam hal ini menunjukkan nilai sig (2 tailed) sebesar 0,00 dengan koefisien korelasi -0,647. Semakin rendah kesejahteraan rumah tangga, maka semakin tinggi manfaat BUMDes yang dirasakan. Sebaliknya, semakin tinggi kesejahteraan rumah tangga, maka kebermanfaatannya semakin rendah. Namun jika dirinci lebih jauh, hubungan manfaat ekonomi BUMDes dengan tingkat kesejahteraan bersifat searah (sig: 0,01; koefisien korelasi: 0,573), sehingga semakin tinggi tingkat kesejahteraan rumah tangga, maka semakin tinggi tingkat manfaat ekonomi yang didapatkan. Sementara itu, hubungan manfaat sosial BUMDes dengan tingkat kesejahteraan bersifat tidak searah (sig: 0,00; koefisien korelasi: -0,866), sehingga semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga, maka semakin tinggi tingkat manfaat sosial yang didapatkan.

Saran

Berikut merupakan beberapa saran dari penulis, baik kepada Pengurus BUMDes Tirta Mandiri maupun untuk kepentingan penelitian berikutnya:

1. Pengurus BUMDes Tirta Mandiri sebaiknya terus mempertahankan kontribusinya dalam memberi manfaat sosial yang tinggi kepada masyarakat lapisan bawah. Pengurus juga perlu mengupayakan agar masyarakat lapisan bawah lebih mudah dalam mengakses manfaat ekonomi dari kehadiran BUMDes sehingga tidak hanya cenderung dirasakan oleh lapisan masyarakat tengah dan atas, misalnya dengan pembuatan sarana-sarana pendukung pariwisata yang menyerap tenaga kerja dari lapisan bawah masyarakat
2. Pengurus BUMDes Tirta Mandiri perlu meningkatkan inovasi dan perluasan bidang pariwisata sehingga ikon Desa Ponggok tidak hanya bertumpu pada Umbul Ponggok yang saat ini telah mulai memasuki masa jenuhnya. Perluasan pariwisata dapat dilakukan, misalnya dengan mengadakan festival budaya tahunan yang mengangkat keunikan lokalitas dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang

ada di Desa Ponggok. Hal ini dilakukan agar usaha BUMDes Tirta Mandiri di bidang pariwisata dapat terus berkelanjutan

3. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail mengenai usaha masyarakat di bidang perikanan yang dikelola Pokdarwis karena erat kaitannya dengan usaha BUMDes dalam pengelolaan pariwisata berbasis sumber daya lokal dan potensi SDA desa Ponggok

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi M. 2014. Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik desa menuju *Asean Economic Community* 2015. *El-Riyasah* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 5(1): 32-40. Dapat diunduh dari <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/656/610>
- Budiono P. 2015. Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) di Bojonegoro. Studi di desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu dan desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor. *Jurnal Politik Muda* [internet]. [diunduh 2016 Okt 21]; 4(1): 116-125. Dapat diunduh dari: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm3cd22097c1full.pdf>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2019. *Berita Resmi Statistik*. No. 56/07/Th. XXII [internet]. [diunduh 2019 Agu 28] Dapat diunduh dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/presentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Chikamawati Z. 2015. Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Journal & Proceeding FEB Unsoed* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 5(1): -. Dapat diunduh dari http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/603/pdf_47
- Eko S, FPPD. 2013. Membangun BUMDes yang mandiri, kokoh dan berkelanjutan [policy paper]. [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]. Dapat diunduh dari https://www.academia.edu/10367542/Badan_Usaha_Milik_desa
- Eko S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta (ID): FPPD.

- Hekmatyar V, Nugroho F. 2018. Badan usaha milik desa dan pembangunan sosial di Kabupaten Bojonegoro. *Sosio Konsepsia* [internet]. [diunduh pada 2019 Sep 3]; 7(3): 176-189. Dapat diunduh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1444/854>
- Kasila M. 2018. Partisipasi pemuda desa dalam perkembangan usaha BUMDes “tirta mandiri”. Sstudi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. *JSKPM* [internet]. [diunduh pada 2019 Sep 9]; 2(1): 43-58. Dapat diunduh dari <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58>
- Kusuma GH, Sari NP, Susilo B, Komara EK. 2016. BUMDes: kewirausahaan sosial yang berkelanjutan. Analisis potensi dan permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik desa di desa Ponjong, desa Bleberan, dan desa Sumbermulyo. *Policy paper* [internet]. [diunduh pada 2016 Des 9]. Dapat diunduh dari: <http://jembatantiga.com/wp-content/uploads/BUMDes-Kewirausahaan-Sosial-yang-Berkelanjutan.pdf>
- [Pattiro] Pusat Telaah dan Informasi Regional. 2016. Mempertanggung Badan Usaha Milik desa untuk Menggerakkan Ekonomi desa [policy brief]. [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]. Dapat diunduh dari <http://pattiro.org/2016/11/mempertanggung-badan-usaha-milik-desa-untuk-menggerakkan-ekonomi-desa/>
- Putra AS. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta (ID): Kemendes PDTT
- Ramadana CB, Ribawanto H, Suwondo. 2014. Keberadaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. Studi di desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. *JAP* [internet]. [diunduh 2016 Okt 21]; 1(6): 1068-1076. Dapat diunduh dari: <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/viewFile/189/169>
- Ridlwani Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justicia* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 8(3): 424-440. Dapat diunduh dari <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/314/273>
- Rosni. 2017. Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *J. Geografi*. [internet]. [diunduh pada 2017 Mar 28]; 9(1): 53-66. Dapat diunduh dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/issue/view/875/showToc>
- Sayutri HM. 2011. Pelembagaan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Donggala. *Academica* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 3(2): 717-728. Dapat diunduh dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2289/1482>
- Sugiharto E. 2007. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan desa Banua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik. *JEPP*. [Internet]. [diunduh pada Mar 7 2017]; 4(1): 32-36. Dapat diunduh dari <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-4-no-1-eko.pdf>
- Suharto E. 2006. Peta dan dinamika *welfare state* di beberapa negara: pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia? Makalah Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta [2006 Jul 25, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta]. [Internet]. [diunduh pada 2017 Apr 12]. Dapat diunduh dari: http://policy.hu/suharto/download_page.htm
- Sidik F. 2015. Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *JKAP* [internet]. [diunduh pada 2016 Des 11]; 19(2): 115-131. Dapat diunduh dari <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7962>
- Syukran A. 2016. Dampak kegiatan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) bagi masyarakat desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. *Publika* [internet]. [diunduh pada 2017 Jan 1]; 4(4): 1-9. Dapat diunduh dari <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/14707/1871>